

AN-NABA: Islamic Communication Journal

Vol. 4 No. 1, June 2025, ISSN 3047-5279, 34-66

<https://doi.org/10.51311/annaba.v4i1.1298>

**Analisis Kebijakan Komunikasi Organisasi pada Bidang
Pengkaderan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
Cabang Bungo dalam Menghadapi Perubahan Sosial**

Muhammad Anshori

Institut Agama Islam Yasni Bungo

Email: muhammadanshori@iaiyasnibungo.ac.id

Viza Pamita

Institut Agama Islam Yasni Bungo

Email: vizapamita@iaiyasnibungo.ac.id

Abstract

Communication policy represents a model of the communication process, where various models can be applied to identify the most suitable and effective pattern for communication. In an organization, cadre development is a crucial activity, especially for PMII Bungo Branch, which conducts it at the beginning of each academic year. The success of PMII's cadre development can be seen through the organizational communication policies implemented by the board toward its members. This study aims to analyze the communication policies, challenges faced by the cadre development division, and the strategies to overcome communication barriers in PMII Bungo Branch. Using a qualitative approach, data were collected from the board members and several cadres through observation, interviews, and documentation. The findings reveal three key conclusions: first, Vertical Communication top-down and bottom-up pattern ensuring that directives, policies, and aspirations are clearly conveyed during the cadre development process; second, Horizontal Communication interactions among members or divisions at the same level to strengthen coordination, solidarity, and collaboration; third, Adaptive Communication the division's ability to adjust communication strategies in line with social change, campus dynamics, and members' needs to remain relevant and effective.

Keywords: Organizational Communication Policy, Cadre Development, Social Change.

Abstrak

Kebijakan komunikasi merupakan model dari proses komunikasi, sehingga dengan adanya berbagai macam model komunikasi dari proses komunikasi maka akan dapat ditemukan pola yang cocok dan mudah digunakan untuk berkomunikasi. Dalam sebuah organisasi, pengkaderan merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh organisasi PMII Cabang Bungo disetiap awal tahun akademik. Keberhasilan pengkaderan PMII dapat dilihat pada kebijakan komunikasi organisasi yang digunakan oleh pengurus terhadap para kader. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan komunikasi organisasi yang digunakan oleh PMII pada bidang pengkaderan tersebut maka penulis berusaha untuk melakukan penelitian tentang kebijakan komunikasi organisasi pada bidang pengkaderan organisasi PMII Cabang Bungo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan komunikasi, kendala yang dihadapi bidang pengkaderan, dan upaya untuk mengatasi kendala komunikasi dalam bidang pengkaderan PMII Cabang Bungo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data dari pengurus dan beberapa anggota kader PMII Cabang Bungo. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini ada tiga kesimpulan yang diperoleh. *Pertama* Vertikal Pola komunikasi yang berjalan dari pimpinan ke anggota (top-down) maupun sebaliknya (bottom-up) untuk memastikan arahan, kebijakan, dan aspirasi tersampaikan secara jelas dalam proses pengkaderan. *Kedua* Horizontal Interaksi komunikasi yang terjalin antaranggota atau antarbidang di tingkat yang sama untuk memperkuat koordinasi, solidaritas, dan kerja sama dalam pelaksanaan kaderisasi. *ketiga* Adaptif Kemampuan bidang pengkaderan menyesuaikan strategi komunikasi dengan perubahan sosial, dinamika kampus, dan kebutuhan kader, sehingga tetap relevan dan efektif.

Kata kunci: Kebijakan Komunikasi organisasi, Pengkaderan, Perubahan Sosial.

Pendahuluan

Perubahan sosial yang terjadi secara cepat dalam masyarakat Indonesia, khususnya dalam lingkungan mahasiswa, menuntut organisasi kemahasiswaan untuk mampu menyesuaikan strategi dan kebijakan internalnya agar tetap relevan dan efektif. Salah satu organisasi mahasiswa Islam yang memiliki pengaruh dan sejarah panjang dalam proses kaderisasi dan gerakan intelektual adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Sebagai organisasi yang lahir dari semangat pembaharuan dan moderasi dalam Islam, PMII memiliki tanggung jawab strategis dalam membentuk kader-kader bangsa yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan keilmuan.

Dalam konteks PMII Cabang Bungo, Provinsi Jambi, tantangan perubahan sosial yang meliputi perkembangan teknologi informasi, arus

globalisasi, hingga perubahan karakter generasi mahasiswa, menjadi isu penting yang harus direspon secara tepat oleh bidang pengkaderan. Bidang ini merupakan tulang punggung dalam mencetak generasi pelanjut yang militan, ideologis, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Namun demikian, efektivitas komunikasi organisasi dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengkaderan kerap menjadi titik krusial yang mempengaruhi keberhasilan proses kaderisasi.

Salah satu acuan normatif yang mendasari kerja-kerja organisasi dalam PMII adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Dalam AD PMII bab 3 pasal 4 disebutkan bahwa tujuan utama organisasi adalah "membentuk pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ajaran Islam *AhlussunnahwalJama'ah* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)"¹. Tujuan ini menjadi dasar filosofis bagi bidang pengkaderan untuk merancang kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai keorganisasian, pentingnya komunikasi dan persatuan dalam organisasi, terutama di konteks PMII sebagai organisasi mahasiswa Islam.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ عِ آخَوِيكُمْ وَأَقْبُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati," QS. Al Hujurat ayat 10.²

Ayat ini menekankan konsep "persaudaraan" di antara kaum mukmin. Dalam konteks organisasi seperti PMII, persaudaraan ini sangat bergantung pada komunikasi yang efektif, transparan, dan harmonis antaranggota dan antar bidang (komunikasi vertikal dan horizontal). Kebijakan komunikasi yang baik akan memelihara *ukhuwah* (persaudaraan) tersebut, mencegah konflik, dan memastikan tujuan bersama tercapai.

Sementara itu, dalam ART PMII dijelaskan bahwa kaderisasi merupakan proses pembinaan anggota yang dilakukan secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan³tan, guna membentuk kader yang memiliki

¹Mubin, "Metamorfosa PMII: Pergerakan, Paradigma, dan Nasionalisme," diakses April 10, 2025, https://alhikmahjkt.ac.id/Archieve/kolom_mahasiswa/read/5.

²Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Penthasihan Mushaf Alquran, 2019).

³

integritas dan loyalitas terhadap organisasi.⁴ Ayat ini dapat menjadi landasan moral bahwa pengkaderan tidak hanya tentang transfer ilmu, tetapi juga menanamkan nilai persaudaraan dan tanggung jawab bersama dalam menghadapi tantangan zaman, sejalan dengan nilai-nilai *AhlussunnahwalJama'ah* yang dipegang PMII. Dalam praktiknya, proses kaderisasi PMII dilakukan melalui berbagai tahapan seperti Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA), Pelatihan Kader Dasar (PKD), Pelatihan Kader Lanjut (PKL), hingga Pelatihan Kader Nasional (PKN). Masing-masing tahap memiliki kurikulum dan tujuan tertentu yang mendukung pembentukan karakter dan kapasitas kader.

Sejalan dengan proses tersebut, untuk menjalankan visi dan misinya PMII memiliki seperangkat aturan dan kebijakan yang tertuang dalam Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Peraturan Organisasi (PO), serta kebijakan organisasi lainnya yang berfungsi sebagai landasan konstitusional dan operasional, sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh kader dalam mengarahkan gerak langkah perjuangan dan pengabdian di tengah masyarakat.

Anggaran Dasar (AD) PMII memuat dasar-dasar ideologis organisasi, termasuk tujuan pembentukan kader Muslim Indonesia yang bertaqwa, berilmu, dan bertanggung jawab. ART menjabarkan teknis pelaksanaan AD, seperti mekanisme keanggotaan dan kaderisasi. Dalam Pasal 10 ART, dijelaskan tahapan pembinaan kader melalui Pelatihan Kader Dasar (PKD) dan Lanjut (PKL). Peraturan Organisasi (PO) memperkuat AD/ART dengan mengatur teknis kaderisasi, etika organisasi, dan sistem kerja pengurus. Salah satu yang penting adalah PO Kaderisasi Nasional yang mengatur alur pembinaan kader di tingkat Komisariat hingga Pengurus Besar. Selain itu, PMII juga menetapkan kebijakan melalui forum resmi seperti Kongres dan Rakernas. Contohnya adalah Gerakan Kaderisasi Transformatif yang menekankan orientasi kader pada perubahan sosial berbasis nilai Aswaja dan nasionalisme⁵.

Namun demikian, dinamika internal organisasi, persoalan teknis di lapangan, dan lemahnya komunikasi antar-struktur organisasi seringkali menjadi kendala dalam implementasi kebijakan kaderisasi. Berdasarkan observasi awal, ditemukan bahwa koordinasi antara bidang kaderisasi

⁴ Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), *Anggaran Rumah Tangga (ART) PMII, Bab IV, Pasal 7 tentang Sistem Kaderisasi* (t.t.p: WordPress, t.t.), h. 12.

⁵A. Hasani, "Kaderisasi dan gerakan intelektual PMII dalam perspektif transformasi sosial," *Jurnal Moderat* 7, no. 1 (2021): 45–59.

dengan pengurus rayon, komisariat, dan alumni belum berjalan secara optimal, terutama dalam menyusun program yang berbasis kebutuhan aktual mahasiswa di tengah perubahan sosial.⁶ Selain itu, penggunaan media digital sebagai sarana komunikasi organisasi masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi dalam strategi komunikasi yang sistematis.

Kebijakan komunikasi organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjembatani antara perumusan ide dan implementasi kebijakan pengkaderan. Dalam teori komunikasi organisasi, komunikasi yang efektif akan menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Hal ini selaras dengan pandangan Gibson dan Ivancevich yang menyatakan bahwa komunikasi organisasi adalah proses penyampaian informasi dan pengertian dari satu individu ke individu lainnya dalam suatu organisasi.⁷ Jika proses komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka kemungkinan besar akan terjadi distorsi informasi, kesalahpahaman, bahkan konflik antar anggota organisasi.

PMII sebagai organisasi kader dan intelektual juga dihadapkan pada tantangan untuk terus menyesuaikan pola komunikasi organisasinya dengan perkembangan teknologi digital. Generasi mahasiswa saat ini yang tergolong dalam generasi Z memiliki karakteristik khusus dalam hal berkomunikasi, yakni lebih menyukai komunikasi yang cepat, terbuka, dan berbasis teknologi⁸.

Dengan latar belakang tersebut, penulis merasa penting untuk melakukan analisis terhadap kebijakan komunikasi organisasi di bidang pengkaderan PMII Cabang Bungo, guna melihat sejauh mana kebijakan komunikasi organisasi tersebut dalam merespon perubahan sosial yang terjadi, serta bagaimana implikasinya terhadap keberlangsungan kaderisasi PMII ke depan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan model komunikasi organisasi yang efektif dalam konteks organisasi kemahasiswaan berbasis nilai-nilai Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

⁶Ari Nugraha Putra, "Wawancara Ketua Bidang Kaderisasi PMII Cabang Bungo" (Bungo, 2025).

⁷James L. Gibson dan John M. Ivancevich, *Organizations: Behavior, Structure, Processes* (New York: McGraw-Hill, 1994).

⁸Marc Prensky, "Digital Natives, Digital Immigrants," *Horizon* 9, no. 5 (2001): 4.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk mengkaji secara mendalam kebijakan komunikasi organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bungo dalam merespons dinamika perubahan sosial. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami proses sosial, makna, dan praktik komunikasi organisasi yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.⁹ Metode studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada satu unit organisasi dalam konteks sosial yang spesifik dan terikat, sehingga memungkinkan analisis yang holistik terhadap proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan komunikasi dalam kaderisasi.¹⁰ Landasan normatif penelitian ini merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMII sebagai pedoman ideologis dan struktural yang mengarahkan kebijakan komunikasi dan pengkaderan organisasi.

Penelitian dilaksanakan di Sekretariat PMII Cabang Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Data dikumpulkan melalui sumber primer dan sekunder untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan kontekstual. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi lapangan yang melibatkan pengurus PMII periode 2020 ke atas, anggota aktif, alumni, serta tokoh masyarakat dan akademisi lokal yang relevan. Wawancara bertujuan menggali pengalaman, pandangan strategis, serta praktik komunikasi organisasi dalam merespons perubahan sosial.¹¹ Observasi partisipatif dilakukan untuk memahami secara langsung pola interaksi, alur komunikasi internal, dan implementasi kebijakan komunikasi dalam kegiatan kaderisasi dan advokasi sosial. Data sekunder diperoleh dari dokumen organisasi, arsip kegiatan, pemberitaan media, media sosial resmi PMII, serta literatur akademik yang relevan sejak tahun 2020.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan dengan mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.¹²

⁹ John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, ed. ke-4 (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018).

¹⁰ Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, ed. ke-6 (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018).

¹¹ Steinar Kvale dan Svend Brinkmann, *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*, ed. ke-3 (Los Angeles: Sage Publications, 2015).

¹² Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. ke-4 (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2020).

Data dianalisis melalui proses pengodean tematik untuk mengidentifikasi pola komunikasi, nilai ideologis, dan strategi adaptasi organisasi terhadap perubahan sosial. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik, peningkatan ketekunan, serta member check guna memastikan kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas temuan penelitian.¹³ Dengan kerangka metodologis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam kajian komunikasi organisasi serta menjadi rujukan praktis bagi organisasi kemahasiswaan dalam merancang kebijakan komunikasi yang adaptif dan kontekstual.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, diketahui bahwa kebijakan komunikasi yang diterapkan oleh PMII Cabang Bungo dalam bidang pengkaderan bersifat vertikal, horizontal, dan adaptif terhadap teknologi digital. Komunikasi vertikal terjadi dari tingkat pengurus cabang ke bidang kaderisasi, kemudian dilanjutkan ke pengurus komisiariat dan rayon. Komunikasi horizontal tampak pada kolaborasi antar divisi dalam merancang serta melaksanakan kegiatan kaderisasi.

Ketua Umum PMII Cabang Bungo, Hendro Zami menjelaskan bahwa kebijakan komunikasi organisasi tidak hanya dilakukan secara formal melalui rapat, tetapi juga secara nonformal melalui media sosial dan komunikasi personal. ia menyatakan:

“Kita biasanya menyampaikan informasi penting secara berjenjang”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan komunikasi organisasi yang diterapkan oleh bidang pengkaderan PMII Cabang Bungo dalam merespons perubahan sosial yang terjadi, baik secara internal maupun eksternal. Data dikumpulkan melalui teknik observasi partisipatif, dokumentasi kegiatan kaderisasi, serta wawancara mendalam dengan Ketua Umum, Ketua Bidang Kaderisasi, dan beberapa kader aktif PMII Cabang Bungo. Penelitian ini difokuskan pada analisis kebijakan komunikasi organisasi di bidang pengkaderan PMII Cabang Bungo dalam menghadapi perubahan sosial. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus cabang, ketua bidang kaderisasi, ketua umum,

¹³ Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1985).

serta panitia pelaksana kaderisasi. Selain itu, observasi langsung terhadap kegiatan pengkaderan, serta dokumentasi rapat, media komunikasi internal, dan agenda kegiatan turut digunakan untuk memperkuat temuan.

1. Kebijakan komunikasi pengurus cabang pada bidang pengkaderan.

Kebijakan komunikasi organisasi dalam tubuh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bungo merupakan aspek strategis dalam menjaga keberlangsungan proses kaderisasi dan kesinambungan ideologi organisasi. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, diketahui bahwa pengurus cabang PMII Bungo menerapkan kebijakan komunikasi yang terencana, hierarkis, tetapi tetap terbuka dan partisipatif terhadap kader di tingkat komisariat dan rayon. Kebijakan komunikasi ini tidak hanya dimaknai sebagai upaya menyampaikan informasi dari pengurus cabang kepada kader, melainkan juga sebagai bentuk interaksi ideologis dan kultural yang meneguhkan identitas kader PMII sebagai mahasiswa Islam yang berkarakter Aswaja (Ahlussunnah wal Jama'ah). Komunikasi organisasi dalam konteks ini mengandung nilai pendidikan, pembinaan, dan penguatan solidaritas di antara anggota. Dalam struktur organisasi, kebijakan komunikasi pengurus cabang dirumuskan melalui forum resmi seperti: Rapat Harian Pengurus Cabang (RPH), Rapat Koordinasi Bidang, Konferensi Cabang (KONFERCAB), dan Rapat Bidang Pengkaderan yang secara khusus membahas pola komunikasi dalam proses kaderisasi.

Dari hasil dokumentasi internal organisasi, diketahui bahwa arah kebijakan komunikasi PMII Bungo dituangkan dalam dokumen "Pedoman Komunikasi dan Koordinasi Organisasi" yang menjadi acuan resmi bagi semua bidang dalam menjalankan fungsi komunikasi. Dalam dokumen tersebut ditegaskan bahwa komunikasi antar pengurus dan kader harus dijalankan dengan prinsip:

a. Keterbukaan (Transparansi Informasi dan Partisipasi Kader)
Keterbukaan

menjadi prinsip paling mendasar dalam kebijakan komunikasi yang diterapkan oleh Pengurus Cabang PMII Bungo. Keterbukaan ini mencerminkan nilai demokrasi dan partisipasi aktif kader dalam setiap aktivitas organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua PC PMII Bungo, Hendro Zami, dijelaskan bahwa:

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh kader mengetahui arah gerak organisasi. Tidak ada yang ditutup-tutupi, baik dalam hal keputusan,

kebijakan, maupun kegiatan. Semua informasi yang berkaitan dengan organisasi harus dapat diakses oleh kader.”

Kebijakan keterbukaan ini diwujudkan melalui beberapa bentuk konkret:

- a. Penyampaian informasi secara terbuka melalui media resmi seperti grup WhatsApp, surat edaran digital, dan akun media sosial organisasi.
- b. Pelaporan kegiatan dan keuangan secara periodik kepada komisariat dan rayon dalam forum formal.
- c. Forum dialog dan dengar pendapat kader yang rutin dilaksanakan oleh bidang pengkaderan untuk menampung aspirasi dan ide.

Keterbukaan dalam komunikasi organisasi PMII Bungo menunjukkan kesesuaian dengan prinsip partisipatif yang tercantum dalam AD/ART PMII, dimana setiap anggota memiliki hak untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat dalam forum organisasi.¹⁴ Dalam konteks PMII, pengurus cabang berperan bukan sebagai otoritas tunggal, tetapi sebagai fasilitator komunikasi bagi seluruh kader. Selain itu, prinsip keterbukaan juga mengandung nilai amanah dalam perspektif Islam. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 283:

“Maka hendaklah orang yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (menyampaikan dengan jujur) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.” Ayat ini menegaskan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam menyampaikan informasi. Dalam konteks organisasi, keterbukaan menjadi amanah moral bagi pengurus agar komunikasi tidak menjadi alat kekuasaan, tetapi sarana pelayanan terhadap kader. Melalui kebijakan keterbukaan, PMII Bungo berhasil menciptakan iklim organisasi yang lebih demokratis dan akuntabel. Kader merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, yang pada akhirnya memperkuat loyalitas serta rasa memiliki terhadap organisasi.

- b. Koordinasi (Alur Komunikasi yang Terstruktur dan Efektif)

Koordinasi merupakan unsur kedua dari kebijakan komunikasi yang diterapkan oleh pengurus PMII Cabang Bungo. Berdasarkan hasil penelitian, setiap intruksi, kebijakan, dan informasi organisasi diatur secara berjenjang melalui Bidang Peengkaderan, yang menjadi penghubung utama antara pengurus cabang dan kader ditingkat komisariat serta rayon.

¹⁴ Anggaran Dasar PMII, Bab III Pasal 4 tentang Hak dan Kewajiban Anggota .

Ketua Bidang Pengkaderan, Ari Nugraha Putra, menjelaskan dalam wawancara:

“Kami menjalankan pola komunikasi yang sistematis. Semua kegiatan kaderisasi di komisariat harus dikoordinasikan terlebih dahulu ke cabang. Hal ini untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sejalan dengan visi dan nilai organisasi. Namun, kami juga tetap memberi keleluasaan kepada kader untuk berinovasi di lapangan.”

Koordinasi yang baik mencegah terjadinya tumpang tindih informasi dan kesalahpahaman di antara kader. Dalam AD PMII Bab IV Pasal 5 tentang struktur organisasi, ditegaskan bahwa setiap tingkatan pengurus memiliki fungsi koordinatif dan tanggungjawab terhadap jenjang di bawahnya.¹⁵ PMII Bungo menjalankan koordinasi melalui beberapa mekanisme, antara lain:

1. Rapat koordinasi antar pengurus bidang setiap dua minggu sekali.
2. Forum komunikasi ketua komisariat dan rayon yang dilaksanakan setiap bulan.
3. Sistem pelaporan digital dan administrasi kaderisasi.

Dengan demikian, kebijakan komunikasi PMII Bungo menampilkan struktur komunikasi vertikal dan horizontal secara seimbang:

1. Vertikal: dari pengurus cabang ke bidang, komisariat, dan rayon.
2. Horizontal: antarbidang dan antaranggota yang memiliki tanggung jawab seajar.

Koordinasi semacam ini memperlihatkan keselarasan dengan prinsip “kesatuan gerak dan tanggungjawab” sebagaimana diatur dalam ART PMII tentang mekanisme hubungan antarstruktur.¹⁶

Melalui koordinasi yang kuat, pengurus cabang dapat memastikan bahwa seluruh aktivitas kaderisasi berjalan sesuai dengan garis kebijakan organisasi, tanpa mengurangi ruang ekspresi kader. Dalam observasi lapangan, koordinasi terlihat jelas pada pelaksanaan kegiatan kaderisasi seperti Latihan Kader Dasar (LKD) dan Latihan Kader Menengah (LKM), di mana setiap instruksi teknis disampaikan secara bertingkat. Hasilnya, kegiatan berlangsung tertib, efektif, dan minim konflik komunikasi antar pihak.

c. Etika Aswaja (Nilai Komunikasi Islam dalam PMII)

Aspek ketiga dan terpenting dalam kebijakan komunikasi organisasi PMII Bungo adalah Etika Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja). Etika ini menjadi

¹⁵ Anggaran Dasar PMII, Bab IV Pasal 5 tentang Struktur dan Mekanisme Organisasi.

¹⁶ Anggaran Rumah Tangga PMII, Bab VI Pasal 10 tentang Hubungan Antarstruktural

landasan moral yang menuntun bagaimana komunikasi dilakukan dalam setiap jenjang organisasi. Dalam wawancara, Sekretaris Umum, Putri Ayu Anggraini, S.Pd, menyampaikan:

“Kami selalu mengingatkan bahwa komunikasi dalam organisasi PMII tidak boleh keluar dari nilai-nilai Aswaja. Artinya, setiap kader harus menjaga adab berbicara, mengedepankan tabayyun, tidak mudah menyebar isu, dan selalu mendahulukan musyawarah.” Etika Aswaja dalam komunikasi organisasi PMII memiliki beberapa prinsip utama:

- a. Tabayyun (klarifikasi informasi) tidak menyebarkan kabar sebelum memastikan kebenarannya.
- b. Tawassuth (moderat) bersikap seimbang dan tidak ekstrem dalam berpendapat.
- c. Tasamuh (toleransi) menghormati perbedaan pandangan antar kader.
- d. Ta’adul (adil) menyampaikan informasi secara objektif dan proporsional.
- e. Amar ma’ruf nahi munkar menjadikan komunikasi sebagai sarana kebaikan dan pembinaan.

Dalam perspektif Islam, etika komunikasi sangat ditekankan dalam QS. Al-Hujurat ayat 6:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti (tabayyun), agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya.”

Ayat ini menjadi dasar normatif bagi pengurus PMII Bungo untuk mengedepankan etika Aswaja dalam setiap komunikasi. Nilai-nilai Aswaja menjadikan komunikasi organisasi tidak hanya berfungsi praktis, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan moral. Dalam praktiknya, penerapan etika Aswaja terlihat dari cara pengurus cabang membimbing kader. Ketika terjadi perbedaan pandangan atau miskomunikasi, penyelesaiannya selalu dilakukan melalui musyawarah dengan bahasa yang santun dan menghargai pendapat kader. Sikap semacam ini menjadikan komunikasi organisasi PMII Bungo berkarakter ukhuwah (persaudaraan) dan tawazun (keseimbangan). Penerapan etika Aswaja juga selaras dengan Bab II AD PMII tentang Asas dan Nilai Dasar Pergerakan, yang menegaskan bahwa seluruh kader wajib berpedoman pada ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama’ah dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Dengan demikian, etika

komunikasi bukan sekadar prosedur, melainkan bagian dari kepribadian kader PMII.¹⁷

d. Sintesis dari Ketiga Unsur.

Jika ketiga unsur tersebut (keterbukaan, koordinasi, dan etika Aswaja) dikaitkan satu sama lain, maka kebijakan komunikasi PMII Bungo dapat dipahami sebagai sistem yang terbuka secara informasi, teratur secara struktur, dan bermoral secara nilai. Keterbukaan menjamin transparansi, koordinasi memastikan efektivitas, sedangkan etika Aswaja menjaga moralitas dan keharmonisan antar kader. Kombinasi ketiganya mencerminkan komunikasi organisasi yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga berbasis nilai-nilai spiritual dan kebangsaan, sesuai dengan identitas PMII sebagai organisasi kaderisasi Islam moderat yang responsif terhadap perubahan sosial.

1. Hasil Wawancara

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pengurus cabang PMII Bungo, peneliti memperoleh gambaran bahwa komunikasi antara pengurus cabang dan kader diatur dengan pendekatan yang sistematis dan humanis. Ketua PC PMII Bungo, Hendro Zami, menjelaskan:

“Kami di pengurus cabang berkomitmen agar komunikasi dengan kader tidak hanya bersifat perintah atau instruksi, tetapi juga ruang dialog. Kebijakan kami mengharuskan setiap bidang, khususnya bidang pengkaderan, untuk menyampaikan informasi organisasi secara jelas dan terbuka kepada kader. Tujuannya agar tidak ada jarak antara pengurus dan kader, karena dalam PMII semua kader adalah bagian dari keluarga besar yang setara.”

Sementara itu, Sekretaris Umum, Putri Ayu Anggraini, S.Pd, menegaskan:

“Kebijakan komunikasi kami bersifat dua arah. Dari pengurus cabang ke kader tentu bersifat struktural, namun dari kader ke cabang juga kami buka ruang aspirasi. Setiap kader berhak memberikan masukan, kritik, bahkan saran tentang kegiatan organisasi. Kami menggunakan berbagai media, mulai dari grup WhatsApp resmi, surat edaran digital, hingga forum kaderisasi. Jadi, komunikasi kami tidak lagi hanya bersifat tatap muka, tapi juga memanfaatkan teknologi digital.”

Ketua Bidang Pengkaderan, Ari Nugraha Putra, menambahkan:

“Bidang pengkaderan bertugas memastikan seluruh kader mendapatkan informasi yang sama dan tidak terjadi miskomunikasi. Kami selalu

¹⁷ Anggaran Dasar PMII, Bab II tentang Asas dan Nilai Dasar Pergerakan

menekankan pentingnya tabayyun sebelum menyebarkan informasi, karena terkadang kesalahan kecil dalam komunikasi bisa menimbulkan salah paham di tingkat kader. Kami juga rutin mengadakan forum komunikasi antar ketua komisiariat dan rayon untuk menyatukan persepsi dan strategi kaderisasi.” Dari wawancara di atas, dapat ditarik benang merah bahwa kebijakan komunikasi pengurus cabang PMII Bungo dengan kader menekankan sinergi, keterbukaan, dan koordinasi struktural. Komunikasi bukan hanya dianggap alat penyampaian informasi, tetapi juga sarana pembinaan ideologi dan penguatan nilai perjuangan kader.

2. Hasil Observasi

Melalui hasil observasi lapangan pada kegiatan Latihan Kader Dasar (LKD) di Kabupaten Bungo, peneliti mencatat bahwa komunikasi pengurus cabang dengan kader berlangsung secara intens dan langsung. Setiap instruksi kegiatan disampaikan oleh pengurus cabang melalui forum pembukaan dan penutupan acara. Pada sesi diskusi ideologi dan organisasi, pengurus cabang sering turun langsung memberikan arahan dan membuka ruang dialog dengan peserta. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan komunikasi organisasi tidak bersifat kaku, tetapi menekankan interaksi dua arah yang edukatif. Selain komunikasi lisan, pengurus cabang juga aktif menggunakan media sosial seperti WhatsApp Group Kaderisasi PMII Bungo, Instagram resmi cabang, dan surat elektronik (email organisasi) untuk menyampaikan agenda dan keputusan organisasi. Pemanfaatan media digital ini merupakan bentuk adaptasi terhadap perubahan sosial dan perkembangan teknologi komunikasi di kalangan mahasiswa.

3. Hasil Dokumentasi

Berdasarkan dokumen internal organisasi, seperti Pedoman Kaderisasi PMII Cabang Bungo Tahun 2024, disebutkan:

“Kebijakan komunikasi organisasi diatur secara koordinatif melalui Bidang Pengkaderan dan harus dilaksanakan dengan memperhatikan etika komunikasi Islami. Setiap pesan, informasi, maupun instruksi organisasi wajib disampaikan melalui jalur komunikasi yang sah dan bertanggung jawab.”

Selain itu, dari arsip rapat bidang pengkaderan, terdapat catatan tentang Program Penguatan Komunikasi Kaderisasi yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Program ini bertujuan memperkuat sinergi antara pengurus cabang dan kader dalam menyusun kegiatan yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa dan masyarakat.

4. Analisis Peneliti

Kebijakan komunikasi pengurus cabang PMII Bungo dengan kader merupakan bagian dari strategi komunikasi organisasi modern yang berorientasi pada nilai-nilai partisipatif dan transformatif. Menurut Harold D. Lasswell, komunikasi adalah proses yang menjawab pertanyaan “Who says what, in which channel, to whom, with what effect.” Dalam konteks PMII, kebijakan komunikasi cabang menjawab pertanyaan tersebut melalui sistem penyampaian pesan (informasi organisasi) yang jelas, saluran resmi yang terstruktur, dan tujuan pembinaan kader yang konkret. Bila ditinjau dari teori komunikasi organisasi menurut Pace & Faules, kebijakan komunikasi PMII Bungo dapat dikategorikan sebagai komunikasi sistem terbuka, di mana arus informasi tidak hanya mengalir dari atas ke bawah (top-down), tetapi juga dari bawah ke atas (bottom-up). Artinya, kader memiliki hak dan ruang untuk menyampaikan pandangan, ide, bahkan kritik terhadap kebijakan organisasi. Hal ini selaras dengan prinsip demokrasi yang dianut PMII, yaitu “kader adalah subjek perubahan, bukan sekadar objek kebijakan.”

Dalam perspektif teori kebijakan komunikasi organisasi menurut Effendy, komunikasi organisasi yang efektif adalah yang mampu mengubah sikap, pandangan, dan perilaku anggota agar sejalan dengan visi organisasi. PMII Bungo melalui kebijakan komunikasinya berupaya menanamkan kesadaran bahwa setiap kader memiliki tanggung jawab ideologis dan sosial dalam menghadapi perubahan zaman. Oleh karena itu, komunikasi yang dilakukan tidak hanya sebatas instruksi teknis, tetapi juga sarana membangun kesadaran kolektif.

Kebijakan komunikasi yang diterapkan pengurus cabang juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial internal organisasi. Dalam praktiknya, pengurus cabang mengatur mekanisme komunikasi formal agar setiap pesan memiliki legitimasi struktural. Dengan demikian, rumor, misinformasi, atau kesalahpahaman dapat diminimalisasi. Selain fungsi kontrol, kebijakan komunikasi juga berperan dalam memperkuat rasa memiliki (sense of belonging) kader terhadap organisasi. Hal ini tampak dari kesediaan kader mengikuti kegiatan secara sukarela karena merasa dihargai dan dilibatkan dalam setiap proses komunikasi. Dalam menghadapi perubahan sosial, PMII Bungo mengadaptasi kebijakan komunikasinya dengan memanfaatkan media digital tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional organisasi. Komunikasi melalui platform digital dianggap penting untuk menjaga kesinambungan interaksi dengan kader di

tengah kesibukan perkuliahan dan perubahan pola hidup mahasiswa modern.

2. Kendala yang Dihadapi Bidang Pengkaderan dalam Menjalankan Kebijakan Komunikasi Organisasi di Tengah Perubahan Sosial

Dalam menjalankan kebijakan komunikasi organisasi, khususnya dalam bidang pengkaderan, PMII Cabang Bungo menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks. Kendala-kendala tersebut muncul seiring dengan meningkatnya dinamika sosial, perkembangan teknologi, perubahan orientasi mahasiswa, serta terbatasnya sumber daya internal organisasi. Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, serta analisis dokumentasi, berikut ini adalah beberapa kendala utama yang dihadapi:

a. Minimnya Pemahaman Teknis tentang Komunikasi Organisasi

Salah satu kendala utama adalah terbatasnya kapasitas pengurus dalam memahami konsep dan implementasi komunikasi organisasi yang strategis dan sistematis. Komunikasi yang dilakukan masih cenderung bersifat informal dan personalistik, sehingga pesan-pesan organisasi sering kali tidak tersampaikan secara utuh, runtut, dan terstruktur.¹⁸ Sebagian besar pengurus bidang pengkaderan belum memiliki pelatihan khusus dalam merancang komunikasi internal maupun eksternal yang efektif. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas penyebaran informasi tentang kegiatan kaderisasi, serta lemahnya dokumentasi komunikasi antarbidang dalam struktur organisasi.¹⁹

b. Perubahan Pola Komunikasi Kader Akibat Digitalisasi

Kehadiran media sosial dan budaya digital membawa tantangan baru bagi komunikasi organisasi. Kader saat ini lebih aktif di ruang digital, namun komunikasi pengkaderan belum sepenuhnya bertransformasi ke media daring yang interaktif dan menarik. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara metode komunikasi pengurus dan kebiasaan komunikasi kader yang lebih dinamis dan instan.²⁰ Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu pengurus bidang komunikasi,

“Kami masih menggunakan grup WhatsApp dan pamflet PDF, padahal kader lebih tertarik pada konten interaktif seperti video pendek, infografis, atau live streaming. Ini jadi PR besar bagi bidang pengkaderan.”²¹

¹⁸ Wawancara dengan Ketua Bidang Pengkaderan PMII Cabang Bungo, 15 Juli 2025.

¹⁹ Dokumentasi internal rapat evaluasi pengkaderan semester I tahun 2025.

²⁰ Observasi penggunaan media komunikasi oleh kader dan pengurus, Juli 2025.

²¹ Wawancara dengan Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi PMII, 16 Juli 2025.

c. Rendahnya Partisipasi Kader dalam Kegiatan Kaderisasi

Partisipasi kader dalam kegiatan kaderisasi cenderung menurun, terutama pada tahap tindak lanjut pasca-MAPABA atau PKD. Kurangnya komunikasi yang menyentuh aspek kebutuhan dan minat kader menjadi salah satu penyebab utama. Bidang pengkaderan dinilai belum berhasil membangun komunikasi yang bersifat dialogis dan memberdayakan, sehingga kader merasa kurang terhubung secara emosional dengan proses kaderisasi²². Di sisi lain, padatnya aktivitas akademik dan rendahnya motivasi internal kader turut memperbesar tantangan dalam mengajak kader aktif mengikuti kegiatan organisasi secara berkelanjutan²³.

d. Fragmentasi Komunikasi antar-Bidang dan Rayon

Komunikasi antara pengurus cabang dengan pengurus rayon (tingkat komisiariat kampus) juga mengalami hambatan koordinatif. Kurangnya forum komunikasi berkala dan lemahnya sistem pelaporan membuat proses kaderisasi tidak berjalan sinkron antarlevel. Hal ini menyebabkan terjadinya duplikasi kegiatan, ketidaksinkronan kurikulum, dan kurangnya evaluasi menyeluruh.²⁴ Beberapa rayon bahkan menyatakan kurang mendapat arahan jelas dari cabang mengenai arah kaderisasi di tengah isu-isu sosial terbaru yang berkembang di kalangan mahasiswa.²⁵

e. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Keterbatasan jumlah pengurus aktif di bidang pengkaderan menjadi tantangan tersendiri. Dengan cakupan tugas yang luas, mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan pelatihan, hingga pendampingan kader, bidang pengkaderan sering kali mengalami beban kerja yang tidak seimbang. Hal ini diperparah dengan keterbatasan dana operasional untuk mendukung inovasi komunikasi, seperti pengadaan alat dokumentasi, pelatihan digital, atau publikasi.²⁶ Pengurus menyebut bahwa kebijakan komunikasi yang ideal sulit dijalankan karena anggaran lebih banyak difokuskan pada pelaksanaan teknis kaderisasi dibanding penguatan komunikasi organisasi itu sendiri.²⁷

²² Hasil survei internal tingkat partisipasi kader, Juni 2025.

²³ Wawancara dengan peserta PKD angkatan 2024–2025.

²⁴ Notulensi forum koordinasi cabang-rayon, Mei 2025.

²⁵ Wawancara dengan Ketua Rayon PMII IAI Bungo, 17 Juli 2025.

²⁶ Laporan keuangan kegiatan pengkaderan tahun 2024–2025.

²⁷ *Ibid.*

3. Upaya yang Dilakukan Bidang Pengkaderan dalam Merumuskan dan Mengimplementasikan Kebijakan Komunikasi yang Adaptif terhadap Perubahan Sosial

Perubahan sosial yang berlangsung cepat menuntut organisasi kemahasiswaan seperti PMII Cabang Bungo untuk melakukan adaptasi dalam berbagai aspek, termasuk dalam perumusan dan implementasi kebijakan komunikasi organisasi. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, bidang pengkaderan telah melakukan sejumlah upaya strategis untuk membentuk kebijakan komunikasi yang lebih adaptif dan relevan terhadap kebutuhan zaman serta karakter kader yang semakin beragam.

a. Penyesuaian Format Komunikasi Melalui Media Digital

Salah satu upaya penting yang dilakukan adalah penguatan penggunaan media digital dalam proses komunikasi organisasi. Bidang pengkaderan mulai mengintegrasikan platform media sosial seperti Instagram, WhatsApp Group, dan Telegram sebagai sarana penyebaran informasi kaderisasi, rekrutmen, dan internalisasi nilai organisasi.²⁸ Selain itu, pengurus juga mulai mengembangkan konten visual dan audiovisual seperti video pendek, infografis, dan poster digital untuk menyampaikan pesan organisasi dengan gaya komunikasi yang lebih menarik dan komunikatif. Langkah ini diambil

untuk menjawab perubahan preferensi kader terhadap media informasi yang cepat, interaktif, dan mudah diakses²⁹.

“Kami sadar, anak-anak sekarang lebih merespon story IG atau video TikTok daripada pamflet formal. Jadi kami menyesuaikan cara menyampaikan nilai kaderisasi agar tetap nyambung dengan mereka,” jelas salah satu pengurus pengkaderan.³⁰

b. Penguatan Komunikasi Internal Melalui Forum Evaluatif dan Kolaboratif

Bidang pengkaderan juga melakukan penguatan komunikasi internal dengan memperbanyak forum koordinasi lintas bidang dan antar-rayon. Forum ini digunakan untuk menyerap aspirasi kader, berbagi strategi pelaksanaan kaderisasi, serta membentuk konsolidasi komunikasi

²⁸ Dokumentasi penggunaan media sosial PMII Cabang Bungo, 2025.

²⁹ Observasi penggunaan media komunikasi selama kegiatan diskusi dan PKL, 2025.

³⁰ Wawancara dengan Divisi Publikasi dan Dokumentasi Bidang Pengkaderan, 17 Juli 2025.

organisasi yang lebih sinergis.³¹ Melalui musyawarah rutin dan pelatihan internal, pengurus berupaya membangun budaya komunikasi organisasi yang terbuka, dialogis, dan partisipatif. Pendekatan ini diambil agar kebijakan pengkaderan tidak bersifat top-down, tetapi lebih kontekstual dan berakar dari kebutuhan nyata di lapangan.³²

c. Penyusunan Kurikulum Kaderisasi Kontekstual

Dalam merespons perubahan sosial, bidang pengkaderan melakukan peninjauan ulang terhadap materi kaderisasi agar lebih relevan dengan isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh mahasiswa. Beberapa materi baru yang ditambahkan mencakup literasi digital, wawasan gender, lingkungan hidup, dan keorganisasian di era disrupsi teknologi.³³ Upaya ini merupakan bentuk komunikasi substantif, di mana penyampaian nilai-nilai organisasi tidak hanya dilakukan melalui ceramah formal, tetapi melalui diskusi interaktif yang memfasilitasi pemahaman kritis kader terhadap realitas sosial.

d. Pemberdayaan Kader dalam Produksi Informasi

Sebagai bagian dari strategi komunikasi yang partisipatif, bidang pengkaderan mendorong kader untuk ikut serta dalam memproduksi konten informasi organisasi. Hal ini dilakukan melalui pelatihan desain grafis, penulisan artikel, hingga pengelolaan media sosial rayon atau komisariat.³⁴ Pemberdayaan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan kader di bidang komunikasi, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan kader terhadap nilai dan tujuan organisasi. Dalam jangka panjang, kader diharapkan menjadi komunikator-komunikator ideologis yang mampu menyuarakan nilai-nilai PMII secara kreatif dan konstruktif di ruang publik.

e. Kemitraan Strategis dengan Pihak Eksternal

Upaya lainnya adalah membangun kemitraan dengan pihak luar seperti alumni, tokoh masyarakat, LSM, serta akademisi dalam merumuskan narasi komunikasi organisasi yang lebih luas dan berpengaruh. Bidang pengkaderan sering kali melibatkan pihak eksternal sebagai pemateri, fasilitator pelatihan, dan kolaborator kegiatan sosial untuk memperluas

³¹ Notulensi rapat koordinasi bidang pengkaderan dengan rayon IAI dan IAKSS, Mei–Juli 2025.

³² Wawancara dengan Ketua Umum, 16 Juli 2025.

³³ Modul Kaderisasi Kontekstual PMII Bungo, Revisi 2025.

³⁴ Dokumentasi kegiatan pelatihan media dan jurnalistik kader, 2024–2025.

jaringan komunikasi PMII dengan lingkungan luar.³⁵ Langkah ini bukan hanya sebagai bentuk adaptasi organisasi terhadap perubahan sosial, tetapi juga strategi penguatan eksistensi PMII di ruang publik sebagai gerakan intelektual dan sosial yang terbuka.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Kebijakan komunikasi pengurus cabang pada bidang pengkaderan.

Kebijakan komunikasi organisasi dalam tubuh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bungo merupakan wujud nyata dari pelaksanaan prinsip-prinsip organisatoris yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMII. Kebijakan ini berperan penting dalam menjaga kelangsungan proses kaderisasi, kesinambungan ideologi, dan penguatan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) di lingkungan organisasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, terdapat tiga aspek utama dalam kebijakan komunikasi organisasi PMII Cabang Bungo, yaitu: keterbukaan, koordinasi, dan etika Aswaja. Ketiganya berjalan secara sinergis sebagai sistem komunikasi organisasi yang terbuka, terstruktur, dan bermoral.

1. Keterbukaan (Transparansi Informasi dan Partisipasi Kader).

Keterbukaan menjadi prinsip fundamental dalam kebijakan komunikasi PMII Cabang Bungo. Prinsip ini tercermin dalam sikap pengurus cabang yang menekankan transparansi informasi dan partisipasi aktif kader dalam setiap pengambilan keputusan organisasi. Ketua PC PMII Bungo, Hendro Zami, menegaskan bahwa semua informasi terkait keputusan, kegiatan, dan kebijakan organisasi harus dapat diakses oleh seluruh kader. Implementasi prinsip keterbukaan dilakukan melalui berbagai media komunikasi resmi, seperti grup WhatsApp organisasi, surat edaran digital, laporan periodik kepada komisariat, dan forum dengar pendapat kader.

Prinsip ini sejalan dengan AD PMII Bab III Pasal 4 yang menyebutkan bahwa “Setiap anggota berhak memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat dalam forum-forum organisasi.”³⁶

Dengan demikian, keterbukaan bukan hanya bentuk penyampaian informasi, melainkan juga wujud pelibatan kader sebagai subjek aktif

³⁵ Daftar kerjasama kegiatan pelatihan kader PMII Cabang Bungo dengan LSM lokal dan akademisi, 2024–2025.

³⁶ Anggaran Dasar PMII, Bab III Pasal 4 tentang Hak dan Kewajiban Anggota.

dalam dinamika organisasi. Dalam konteks nilai keislaman, prinsip keterbukaan juga merefleksikan amanah moral sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 283, bahwa setiap yang dipercaya wajib menunaikan amanatnya dengan jujur. Maka, pengurus cabang PMII Bungo memahami keterbukaan bukan hanya aspek teknis komunikasi, tetapi juga perintah moral untuk menjaga kejujuran dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi organisasi. Keterbukaan inilah yang kemudian menciptakan suasana demokratis di lingkungan organisasi PMII Cabang Bungo. Setiap kader memiliki rasa percaya dan memiliki terhadap arah gerak organisasi, sesuai dengan semangat partisipatif kader dalam AD PMII.³⁷

2. Koordinasi (Alur Komunikasi yang Terstruktur dan Efektif)

Selain keterbukaan, koordinasi menjadi pilar kedua dalam kebijakan komunikasi organisasi PMII Cabang Bungo. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bidang Pengkaderan, Ari Nugraha Putra, koordinasi yang diterapkan bersifat hierarkis, namun tetap memberi ruang inovasi bagi kader di tingkat komisariat dan rayon.

Koordinasi diatur melalui mekanisme formal, antara lain:

- a. Rapat koordinasi antarbidang setiap dua minggu sekali;
- b. Forum komunikasi ketua komisariat dan rayon setiap bulan;
- c. Sistem pelaporan digital kaderisasi melalui Bidang Pengkaderan.

Sistem komunikasi ini memperlihatkan keseimbangan antara jalur vertikal dan horizontal. Jalur vertikal mengalir dari pengurus cabang ke bidang, komisariat, dan rayon; sedangkan jalur horizontal terjadi antarbidang atau antaranggota yang memiliki tanggung jawab sejajar. Struktur ini sejalan dengan AD PMII Bab IV Pasal 5 tentang Struktur Organisasi, yang menegaskan bahwa setiap tingkatan pengurus memiliki fungsi koordinatif dan tanggung jawab terhadap jenjang di bawahnya.³⁸ Selain itu, koordinasi yang efektif ini juga menggambarkan pelaksanaan prinsip “kesatuan gerak dan tanggung jawab” sebagaimana tercantum dalam ART PMII Bab VI Pasal 10 tentang Hubungan Antarstruktural, di mana setiap pengurus wajib menjalin komunikasi dan koordinasi secara sistematis untuk menjaga konsistensi arah gerak organisasi.³⁹ Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa pola koordinasi semacam ini

³⁷ *Ibid.*, Bab III Pasal 4 Ayat (2) tentang Hak menyampaikan pendapat dalam forum organisasi.

³⁸ Anggaran Dasar PMII, Bab IV Pasal 5 tentang Struktur dan Mekanisme Organisasi.

³⁹ Anggaran Rumah Tangga PMII, Bab VI Pasal 10 tentang Hubungan Antarstruktural.

membuat kegiatan kaderisasi seperti Latihan Kader Dasar (LKD) dan Latihan Kader Menengah (LKM) berjalan tertib, efektif, dan minim konflik komunikasi. Artinya, kebijakan komunikasi PMII Bungo telah membangun sistem koordinasi yang tidak hanya administratif, tetapi juga memperkuat sinergi emosional dan ideologis antar kader.

3. Etika Aswaja (Nilai Komunikasi Islami dalam PMII)

Etika Aswaja merupakan landasan moral sekaligus ciri khas dalam pola komunikasi PMII. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Umum, Putri Ayu Anggraini, S.Pd, seluruh bentuk komunikasi dalam organisasi harus mencerminkan nilai-nilai Aswaja: sopan santun, tabayyun, musyawarah, dan toleransi. Etika Aswaja ini berakar dari prinsip Bab II AD PMII tentang Asas dan Nilai Dasar Pergerakan, yang menegaskan bahwa PMII berasaskan Islam Ahlussunnah wal Jama'ah, dengan nilai-nilai tawassuth (moderat), tasamuh (toleran), ta'adul (adil), dan tawazun (seimbang).⁴⁰

Oleh karena itu, setiap kader PMII wajib menjaga etika komunikasi berdasarkan nilai-nilai tersebut. Dalam konteks kebijakan komunikasi, penerapan etika Aswaja mengatur bahwa setiap penyampaian informasi harus melalui prinsip:

- a. Tabayyun : klarifikasi kebenaran berita sebelum disebarakan
- b. Tawassuth : sikap moderat dan tidak berlebihan dalam menyampaikan pendapat.
- c. Tasamuh : menghormati perbedaan pandangan antar kader.
- d. Ta'adul : objektif dan proporsional dalam menyampaikan informasi.
- e. Amar ma'ruf nahi munkar : menjadikan komunikasi sebagai sarana kebaikan.

Etika ini sekaligus menjadi pagar moral agar komunikasi organisasi PMII tidak berubah menjadi ajang konflik atau fitnah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 tentang kewajiban tabayyun. Dalam praktiknya, pengurus cabang PMII Bungo selalu menyelesaikan perbedaan pandangan melalui musyawarah dan dialog terbuka, bukan dengan konfrontasi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi di PMII tidak hanya pragmatis, tetapi juga bersifat spiritual dan berkeadaban.

4. Sintesis: Keterpaduan Nilai dan Struktur

Keterbukaan, koordinasi, dan etika Aswaja merupakan tiga pilar yang saling melengkapi dalam kebijakan komunikasi organisasi PMII Cabang

⁴⁰ Anggaran Dasar PMII, Bab II tentang Asas dan Nilai Dasar Pergerakan PMII.

Bungo. Ketiganya membentuk sistem komunikasi yang: Transparan dalam informasi, Teratur dalam struktur, dan Bermoral dalam nilai. Struktur komunikasi yang demikian menunjukkan bahwa PMII Bungo menerapkan sistem komunikasi dua arah yang partisipatif dan terbuka, tanpa menghilangkan karakter keislaman yang menjadi dasar pergerakan. Kebijakan komunikasi ini juga merupakan implementasi nyata dari tujuan PMII sebagaimana tercantum dalam AD PMII Bab II Pasal 3, yaitu **“terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya serta berkomitmen terhadap cita-cita kemerdekaan Indonesia.”*⁴¹ Dengan demikian, kebijakan komunikasi organisasi PMII Cabang Bungo tidak hanya menjadi alat penyampaian informasi, tetapi juga instrumen pembinaan ideologi, pendidikan kader, dan penguatan solidaritas sosial di tengah dinamika perubahan masyarakat.

2. Kendala yang Dihadapi Bidang Pengkaderan dalam Menjalankan Kebijakan Komunikasi Organisasi di Tengah Perubahan Sosial

Dalam konteks sosial yang terus berkembang, bidang pengkaderan PMII Cabang Bungo menghadapi sejumlah kendala dalam implementasi kebijakan komunikasi organisasi. Kendala-kendala ini menjadi tantangan utama dalam mempertahankan efektivitas kaderisasi dan memperkuat fungsi-fungsi organisasi.

a. Minimnya Pemahaman Teknis tentang Komunikasi Organisasi

Salah satu kendala mendasar adalah kurangnya pemahaman teknis para pengurus dan kader mengenai konsep dan praktik komunikasi organisasi yang strategis. Banyak dari pengurus kaderisasi belum memiliki pelatihan yang cukup tentang bagaimana merancang pesan, memilih media yang tepat, serta membangun komunikasi dua arah yang produktif. Hal ini menyebabkan kebijakan komunikasi cenderung berjalan normatif dan tidak efektif dalam menjangkau seluruh elemen organisasi. Beberapa pengurus bahkan masih memahami komunikasi hanya sebatas penyampaian informasi, bukan sebagai alat manajemen organisasi yang kompleks.⁴²

Akibatnya, kebijakan komunikasi yang diterapkan sering kali bersifat normatif dan tidak efektif dalam menjangkau seluruh elemen organisasi. Komunikasi organisasi sangat penting untuk mencapai tujuan bersama, dan organisasi yang tidak memahami hal ini akan kesulitan dalam

⁴¹ Anggaran Dasar PMII, Bab II Pasal 3 tentang Tujuan PMII.

⁴² Hasil wawancara dengan Ketua Bidang Kaderisasi PMII Cabang Bungo, 24 Juli 2025.

beroperasi dengan baik⁴³. Hal ini diperparah ketika para pengurus hanya melihat komunikasi sebagai sarana penyampaian informasi, bukan sebagai alat manajemen organisasi yang kompleks dan kritis.

b. Perubahan Pola Komunikasi Kader Akibat Digitalisasi

Digitalisasi telah mengubah cara kader berkomunikasi. Perpindahan dari komunikasi tatap muka ke komunikasi daring melalui media sosial, grup WhatsApp, dan platform digital lainnya telah menciptakan jarak emosional dan berkurangnya kelekatan organisasi. Selain itu, sebagian besar pengurus belum mampu mengoptimalkan media digital untuk tujuan pengkaderan dan komunikasi strategis. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas penyampaian informasi dan lemahnya konsolidasi antar anggota.⁴⁴ Penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial dalam komunikasi organisasi dapat meningkatkan partisipasi dan interaksi, namun bila tidak dikelola dengan baik, akan menjadi kendala tersendiri⁴⁵. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi dapat menjadi alat bantu yang bermanfaat, pemahaman dan keterampilan dalam menggunakannya tetap harus ditingkatkan.

c. Rendahnya Partisipasi Kader dalam Kegiatan Kaderisasi

Bidang pengkaderan menghadapi tantangan partisipasi yang menurun dari kader, khususnya dalam kegiatan-kegiatan pembinaan dan pelatihan. Hal ini berkaitan dengan kurangnya daya tarik program kaderisasi, jadwal kegiatan yang tidak fleksibel, serta ketidaktertarikan sebagian kader terhadap model pengkaderan konvensional. Faktor ini juga berkaitan erat dengan perubahan gaya hidup mahasiswa yang semakin pragmatis dan sibuk, sehingga sulit melibatkan mereka secara aktif.⁴⁶ Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa motivasi dan sikap kader sangat berpengaruh terhadap partisipasi mereka dalam kegiatan organisasi⁴⁷. Oleh karena itu, penting bagi pengurus untuk merancang kegiatan yang

⁴³ L. Habibi, M., Muhammad, R. H., Adilla, D. N., Perdanaraya, A., & Lutfi, "No Title," *Literasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi* 3, no. 1 (2023).

⁴⁴ Observasi pada kegiatan rapat dan diskusi kaderisasi di PMII Cabang Bungo, April–Juni 2025.

⁴⁵ P. Kusumawardani, A. S. and Muljono, "Hubungan sikap dan motivasi kerja dengan kinerja kader posyandu (kasus: desa coper dan desa kutuwetam, kecamatan jetis, kabupaten ponorogo).," *urnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]* 2, no. 2 (2018).

⁴⁶ Dokumentasi absensi dan laporan kegiatan MAPABA & PKD 2023–2024.

⁴⁷ R. F. Hardinata, "Strategi peningkatan kapasitas anggota bpd dalam upaya menjadikan organisasi yang lebih efektif," *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat* 1, no. 1 (2024): 55–57, <https://doi.org/10.62759/jpim.v1i1.98>.

lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan serta preferensi kader, sehingga dapat meningkatkan tingkat partisipasi mereka dalam program kaderisasi.

d. Fragmentasi Komunikasi antar Bidang dan Rayon

Komunikasi antar bidang dalam struktur cabang serta antar rayon di lingkungan kampus sering kali tidak berjalan harmonis. Kurangnya koordinasi dan sinergi menyebabkan kebijakan pengkaderan tidak terdistribusi secara merata. Ada rayon yang aktif dan adaptif terhadap kebijakan cabang, namun ada pula yang pasif dan terputus dari dinamika komunikasi organisasi. Fragmentasi ini menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaan program kaderisasi.⁴⁸ Dalam konteks ini, komunikasi yang baik antar anggota sangat penting untuk efisiensi organisasi secara keseluruhan.⁴⁹ Komunikasi yang kuat dan terkoordinasi dapat meningkatkan konsolidasi internal yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan organisasi.

e. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Secara struktural, bidang pengkaderan juga menghadapi keterbatasan SDM yang kompeten serta minimnya dukungan anggaran. Kaderisasi yang ideal membutuhkan perencanaan, fasilitator, materi, dan logistik yang memadai. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan program kaderisasi sering kali terkendala oleh tidak adanya dana operasional yang memadai serta ketergantungan pada semangat sukarela kader.⁵⁰ Kendala-kendala tersebut memperlihatkan bahwa perubahan sosial tidak hanya membawa tantangan dari luar, tetapi juga menuntut reformasi internal dalam cara organisasi mengelola komunikasi dan pengembangan kader.

Dengan beragam kendala yang dihadapi, PMII Cabang Bungo perlu melakukan reformasi internal yang mendalam dalam cara mereka mengelola komunikasi dan pengembangan kader. Menerapkan solusi strategis yang terencana, seperti pelatihan komunikasi untuk kader, pengoptimalan pemanfaatan teknologi, serta membangun komunikasi yang lebih inklusif dan menarik, menjadi penting untuk memastikan

⁴⁸ Wawancara dengan Ketua Rayon Tarbiyah dan Ketua Rayon Syari'ah PMII Bungo, 26 Juli 2025.

⁴⁹ Pradnyani, "Implikasi partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial dengan mediasi komitmen organisasi.," *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan* 18, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.31940/jbk.v18i2.185-196>.

⁵⁰ Notulen Rapat Evaluasi Pengkaderan PMII Cabang Bungo Tahun 2025.

keberhasilan program kaderisasi di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

3. Upaya yang Dilakukan Bidang Pengkaderan dalam Merumuskan dan Mengimplementasikan Kebijakan Komunikasi yang Adaptif terhadap Perubahan Sosial

Menghadapi dinamika sosial yang cepat dan kompleks, bidang pengkaderan PMII Cabang Bungo telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan komunikasi organisasi yang adaptif. Upaya-upaya ini bertujuan untuk menjaga relevansi gerakan kaderisasi serta memperkuat konektivitas antar anggota dalam kerangka nilai-nilai ke-PMII-an.

a. Penyesuaian Format Komunikasi Melalui Media Digital

Salah satu respons awal terhadap perubahan sosial adalah adaptasi format komunikasi ke dalam bentuk digital. Penggunaan media sosial seperti Instagram, WhatsApp Group, dan Telegram telah diintensifkan untuk menyebarluaskan informasi kegiatan, materi kaderisasi, serta kampanye ideologis. Hal ini dilakukan sebagai bentuk akomodasi terhadap kebiasaan komunikasi generasi digital yang mengandalkan kecepatan, visualisasi, dan aksesibilitas.⁵¹ Penggunaan konten video pendek, poster interaktif, dan infografik telah menjadi bagian dari strategi komunikasi organisasi yang lebih menarik dan menjangkau.

Dalam kerangka teori komunikasi organisasi, perubahan format komunikasi menunjukkan penggunaan strategi komunikasi yang lebih modern dan relevan, yang sejalan dengan model komunikasi dua arah. Teori ini menekankan pentingnya interaksi aktif antara anggota sebagai cara untuk membangun koneksi dan mendorong partisipasi yang lebih besar⁵². Dengan memanfaatkan konten visual seperti video pendek dan infografik, PMII tidak hanya memperkuat jangkauan informasi, tetapi juga menarik perhatian kader untuk lebih aktif terlibat. Dalam menjalankan komunikasi organisasi, penyampaian informasi dengan cara yang baik sangat dianjurkan. Ini tercermin dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

⁵¹ Hasil observasi media sosial PMII Cabang Bungo dan wawancara dengan Ketua Bidang Komunikasi Publik, 24 Juli 2025.

⁵² S. Romadona, M. R. and Setiawan, "Communication of organizations in organizations change's phenomenon in research and development institution.," *Journal Pekommas* 5, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050110>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِثْلِهِ فِتْنَتُهُمْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.”

b. Penguatan Komunikasi Internal melalui Forum Evaluatif dan Kolaboratif

PMII Cabang Bungo secara berkala mengadakan forum diskusi internal, rapat evaluasi, dan pertemuan koordinatif lintas bidang. Tujuannya adalah membangun kultur komunikasi dua arah yang partisipatif, menghindari stagnasi informasi satu arah dari atas ke bawah, serta memberi ruang bagi kader untuk menyampaikan aspirasi dan kritik.⁵³ Forum-forum tersebut juga dimanfaatkan untuk menyusun agenda bersama dan memperkuat sinergi antar struktur rayon dan cabang. Strategi komunikasi dua arah yang diterapkan di PMII didasarkan pada Teori Komunikasi Interpersonal, di mana lingkungan komunikasi yang terbuka mendorong partisipasi aktif anggota. Forum diskusi dan evaluasi memberikan kesempatan bagi kader untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, menciptakan rasa milik, dan saling berbagi pengalaman. Ini penting untuk mewujudkan kultur komunikasi yang lebih ruang bagi aspirasi kader⁵⁴.

c. Penyusunan Kurikulum Kaderisasi Kontekstual

Dalam menjawab tantangan perubahan sosial, bidang pengkaderan merumuskan kurikulum pelatihan kader (MAPABA dan PKD) yang kontekstual dan responsif terhadap isu-isu kontemporer, seperti moderasi beragama, literasi digital, perubahan iklim, dan ekonomi kreatif.⁵⁵ Kurikulum ini tidak hanya menguatkan ideologi Aswaja dan wawasan kebangsaan, tetapi juga memberikan pembekalan tentang cara menjadi kader yang relevan dengan realitas sosial saat ini. Kurikulum kaderisasi yang disusun juga terinspirasi oleh Teori Pembelajaran Konstruktivis, di mana pembelajaran terjadi melalui keterhubungan dengan pengalaman dan konteks sosial. PMII merumuskan kurikulum yang responsif terhadap isu-isu terkini seperti moderasi beragama dan literasi digital. Program ini bertujuan untuk menciptakan kader yang mampu beradaptasi dan memiliki

⁵³ Dokumentasi forum evaluasi kaderisasi pasca-PKD, Mei 2024-2025.

⁵⁴ M. Elazhari, E. and Situmeang, “Media sosial mempengaruhi perubahan sosial, etika dan perilaku remaja di kota tebing tinggi,” *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society* 3, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v3i2.572>.

⁵⁵ Buku Panduan Kaderisasi PMII Cabang Bungo Edisi Revisi 2025.

kesiapan menghadapi realitas sosial⁵⁶. Hasil dari kurikulum yang diadaptasi dan kontekstual ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran sosial di kalangan kader PMII.

d. Pemberdayaan Kader dalam Produksi Informasi

Strategi lain yang diterapkan adalah mendorong kader agar aktif memproduksi informasi melalui tulisan, video, podcast, dan media lain. Hal ini bertujuan menciptakan ekosistem komunikasi berbasis kader yang tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen wacana ke-PMII-an.⁵⁷

e. Kemitraan Strategis dengan Pihak Eksternal

Untuk memperluas jejaring dan memperkuat efektivitas kebijakan komunikasi, bidang pengkaderan menjalin kerja sama dengan organisasi eksternal seperti lembaga pers mahasiswa, komunitas literasi, serta lembaga dakwah kampus dan ormas kepemudaan.⁵⁸ Kolaborasi ini dilakukan dalam bentuk seminar bersama, pelatihan kader, serta kampanye sosial yang melibatkan masyarakat luas. Kemitraan ini membuka peluang kader untuk mengenal perspektif lintas organisasi dan meningkatkan kapasitas komunikasi lintas sektoral. Jalinan kerja sama dengan organisasi eksternal dapat dipandang melalui Teori Jejaring Sosial, yang menunjukkan bahwa kolaborasi dapat meningkatkan kapabilitas dan efektivitas organisasi. PMII menggandeng lembaga pers mahasiswa dan komunitas literasi untuk memperluas jangkauan informasi dan membangun solidaritas di luar program internal. Melalui kolaborasi, kader memperluas pengetahuan dan pengalaman, serta mendapatkan perspektif baru yang penting dalam memperkuat komunikasi⁵⁹.

Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa bidang pengkaderan PMII Cabang Bungo telah menyadari pentingnya komunikasi organisasi sebagai pilar dalam menghadapi perubahan sosial dan terus berinovasi dalam meresponsnya secara adaptif.

⁵⁶ M. Solihat, "Adaptasi komunikasi dan budaya mahasiswa asing program internasional di universitas komputer indonesia (unikom) bandung," *Jurnal Common* 2, no. 1 (2018).

⁵⁷ Hasil wawancara dengan pengurus bidang pengembangan intelektual, 25 Juli 2025.

⁵⁸ Notulen kerjasama program pelatihan komunikasi bersama UKM Pers Mahasiswa IAI Yasni Bungo, Juni 2025.

⁵⁹ M. Santoso, M. B., Asiah, D. H. S., & Zainuddin, "Tantangan praktik pekerjaan sosial seiring perubahan interaksi sosial di tengah masyarakat modern.," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 3 (2019), <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i3.20221>.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan komunikasi organisasi PMII Cabang Bungo dalam bidang pengkaderan dirancang secara sadar sebagai respons terhadap dinamika perubahan sosial yang memengaruhi karakter mahasiswa dan lingkungan sosial lokal. Kebijakan tersebut dibangun atas tiga pilar utama, yakni keterbukaan informasi, koordinasi organisasi yang terstruktur, serta penerapan etika komunikasi berbasis nilai Ahlussunnah wal Jama'ah. Ketiga unsur ini membentuk sistem komunikasi yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan kader, penguatan ideologi, serta pengendalian sosial internal organisasi. Temuan ini menegaskan bahwa komunikasi organisasi PMII Cabang Bungo bersifat partisipatif, normatif, dan adaptif, sehingga mampu menjaga keberlanjutan kaderisasi sekaligus mempertahankan relevansi gerakan di tengah perkembangan sosial dan teknologi komunikasi.

Di sisi lain, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah tantangan struktural dan kultural yang dihadapi dalam implementasi kebijakan komunikasi, antara lain keterbatasan pemahaman teknis komunikasi organisasi, perubahan pola interaksi kader akibat digitalisasi, rendahnya partisipasi kader, fragmentasi komunikasi antarstruktur, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Untuk merespons tantangan tersebut, bidang pengkaderan PMII Cabang Bungo mengembangkan berbagai strategi adaptif, seperti pemanfaatan media digital, penguatan forum komunikasi internal yang kolaboratif, penyusunan model kaderisasi kontekstual, pemberdayaan kader sebagai produsen informasi, serta pembangunan kemitraan strategis dengan pihak eksternal. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan komunikasi organisasi yang berlandaskan nilai ideologis dan dikembangkan secara adaptif merupakan faktor kunci dalam memperkuat efektivitas kaderisasi dan daya tahan organisasi mahasiswa Islam di tengah perubahan sosial yang semakin.

Daftar Pustaka

- Al-Quran dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Penthasihan Mushaf Alquran, 2019.
- AD/ART PMII. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia: Hasil Kongres XX PMII Balikpapan*. Balikpapan, 2021.

- Arifin, A.Z. "Peran Strategi Digital dalam Rekrutmen Organisasi Mahasiswa." *Jurnal Komunikasi Sosial* 8, no. 2 (2020): 45–56.
- Assegaf, dan Abdul Moqsith. *PMII dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Azis, R., dan M. Fauzan. "Komunikasi Organisasi dalam Meningkatkan Efektivitas Kaderisasi PMII." *Ilmu Sosial dan Humaniora* 10, no. 2 (2022): 101–112.
- Azizah, Nur. "Analisis SWOT Pengkaderan di PMII Cabang Yogyakarta." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023.
- Basri, Hasan. *PMII dan Transformasi Sosial Mahasiswa Islam*. Jakarta: LKiS, 2018.
- Betaubun, Y. Y. "Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia," 2022.
- Bourdieu, Pierre. *The Forms of Capital*. In J. Richardson (Ed.) *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*., 1986.
- Burhani, dan Ahmad Najib. *Islam Nusantara dan Dinamika Keorganisasian Mahasiswa NU*. Yogyakarta: Islami Institute, 2017.
- Damanhuri, dan Ahmad. *Sejarah Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia*. Jakarta: Pustaka PMII, 2005.
- Damanik, J. "Penguatan Ideologi Mahasiswa dalam Gerakan Islam Moderat." *Jurnal Pemikiran Keislaman* 9, no. 1 (2017): 23–34.
- Elazhari, E. and Situmeang, M. "Media sosial mempengaruhi perubahan sosial, etika dan perilaku remaja di kota tebing tinggi." *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society* 3, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v3i2.572>.
- Fadli, Ahmad. "Efektivitas Komunikasi Organisasi dalam Proses Kaderisasi di PMII Cabang Kota Palembang." Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2021.
- Fauzan, R., dan Maulana. "Strategi Komunikasi Organisasi Mahasiswa dalam Menghadapi Perubahan Sosial." *Komunikasi Islam dan Sosial* 4, no. 1 (2021): 23–37.
- Fitriani, L. "Dinamika Perubahan Sosial dalam Organisasi Mahasiswa." *Sosioteknologi* 21, no. 1 (2022): 87–95.
- Gibson, James L., dan John M. Ivancevich. *Organizations: Behavior, Structure, Processes*. New York: McGraw-Hill, 1994.
- Habibi, M., Muhammad, R. H., Adilla, D. N., Perdanaraya, A., & Lutfi, L. "No Title." *Literasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi* 3, no. 1 (2023).

- Handayani, Fitri. "Pengaruh Perubahan Sosial terhadap Minat Kaderisasi dalam Organisasi Mahasiswa Islam." *Pendidikan dan Perubahan Sosial* 9, no. 1 (2024): 61–73.
- Hardinata, R. F. "Strategi peningkatan kapasitas anggota bpd dalam upaya menjadikan organisasi yang lebih efektif." *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat* 1, no. 1 (2024): 55–57.
<https://doi.org/10.62759/jpim.v1i1.98>.
- Hasani, A. "Kaderisasi dan gerakan intelektual PMII dalam perspektif transformasi sosial." *Jurnal Moderat* 7, no. 1 (2021): 45–59.
- Hasyim, dan Syafiq. "PMII dan Perkembangannya di Indonesia." *Jurnal Sosial Keagamaan* 18, no. 2 (2011): 220.
- Herawati, A. "Perubahan sosial masyarakat di masa new normal (analisis menggunakan perspektif sosiologi talcott parsons)." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 26, no. 1 (2023): 286–292.
- Iryani, J., dan N. Syam. "Peran media sosial dalam menyebarkan pesan agama dan perubahan sosial." *Pusaka* 11, no. 2 (2023): 359–372.
- Jambak, A. M., D. Lase, E. Telaumbanua, dan P. Hulu. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi resistensi pegawai terhadap perubahan organisasi di Kantor Pengadilan Agama Gunungsitoli." *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 1 (2023): 22–37.
- Kemenag RI. *Alquran*, n.d.
- Kementerian Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Penthasihan Mushaf Alquran, 2019.h.442.
- Kurniawan, D., dan Rahmawati. "Komunikasi Digital dalam Kaderisasi Organisasi Mahasiswa." *Ilmu Komunikasi dan Organisasi* 7, no. 1 (2023): 55–68.
- Kusumawardani, A. S. and Muljono, P. "Hubungan sikap dan motivasi kerja dengan kinerja kader posyandu (kasus: desa coper dan desa kutuwetam, kecamatan jetis, kabupaten ponorogo)." *urnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]* 2, no. 2 (2018).
- L, Goa. "No Title." *Jurnal Kateketik dan Pastoral* 2, no. 2 (2017): 53–67.
- Mahfudh, Sahal. *Ahlussunnah wal Jamaah sebagai Pandangan Hidup*. Jakarta: LKiS, 2001.
- Maryamah, M., A. Ersyliasari, M. L. Ananda, dan J. Julinda. "Analisis budaya Melayu terhadap modernisasi dalam perspektif mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 10 (2023): 3096–3108.

- Mubin. "Metamorfosa PMII: Pergerakan, Paradigma, dan Nasionalisme." Diakses April 10, 2025. https://alhikmahjkt.ac.id/Archieve/kolom_mahasiswa/read/5.
- Muhaimin, A. G. *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Mulawarman, K., dan Y. Rosilawati. "Komunikasi organisasi pada dinas perijinan kota Yogyakarta untuk meningkatkan pelayanan." *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna* 5, no. 1 (2014): 31–41.
- Munir, H. "Revitalisasi Kaderisasi PMII di Era Disrupsi Digital." *Pemikiran Keislaman dan Gerakan Mahasiswa* 5, no. 2 (2022): 55–67.
- Musthofa, A. "Dinamika Sosial dan Tantangan Kaderisasi PMII di Era Digital." *Pemikiran Islam dan Kemasyarakatan* 7, no. 2 (2023): 76–89.
- Nawawi, H. "Adaptasi Organisasi Mahasiswa terhadap Era Digital." *Jurnal Sosioteknologi* 19, no. 3 (2021): 67–80.
- Nurhadi, A. "Peran Tokoh Perubahan dalam Organisasi Mahasiswa: Studi Sosial PMII di Daerah." *Transformasi Sosial* 6, no. 2 (2023): 88–101.
- Nurhalim, M. "Manajemen Pengkaderan dalam Organisasi Kemahasiswaan: Studi Kasus PMII." *dalam Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat* 3, no. 1 (2021): 45–56. <https://doi.org/10.1234/jkpm.v3i1.123>.
- Pradnyani. "Implikasi partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial dengan mediasi komitmen organisasi." *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan* 18, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.31940/jbk.v18i2.185-196>.
- Pramujo. "Pemanfaatan medium digital online dalam penyuluhan sosial: sebuah tinjauan konseptual." *Sosio Informa* 7, no. 1 (2021).
- Prasetyo, I. "Kegagalan Komunikasi dalam Organisasi Mahasiswa: Studi Kasus pada PMII Komisariat." *Komunikasi Mahasiswa* 5, no. 2 (2022): 101–115.
- Prensky, Marc. "Digital Natives, Digital Immigrants." *Horizon* 9, no. 5 (2001): 4.
- Putra, Ari Nugraha. "Wawancara Ketua Bidang Kaderisasi PMII Cabang Bungo," 2025.
- Ramadani, T. "Komunikasi organisasi pada biro fasilitasi kebijakan energi dan persidangan sekretariat jenderal dewan energi nasional." *Jurnal Komunikasi* 14, no. 2 (2020): 119–134,.
- Romadona, M. R. and Setiawan, S. "Communication of organizations in

- organizations change's phenomenon in research and development institution." *Journal Pekommas* 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050110>.
- Santoso, M. B., Asiah, D. H. S., & Zainuddin, M. "Tantangan praktik pekerjaan sosial seiring perubahan interaksi sosial di tengah masyarakat modern." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i3.20221>.
- Sari, D. "Peran Komunikasi Organisasi dalam Perubahan Sosial: Telaah pada Organisasi Kemahasiswaan Islam." *Komunikasi UMM* 5, no. 3 (2021): 59–70.
- Solihat, M. "Adaptasi komunikasi dan budaya mahasiswa asing program internasional di universitas komputer indonesia (unikom) bandung." *Jurnal Common* 2, no. 1 (2018).
- Susanto, E. *Komunikasi Organisasi: Pendekatan Teoritis dan Praktis*. Prenadamedia Group. Jakarta, 2021.
- Syamsuddin, A. *Komunikasi Organisasi dalam Lembaga Kemahasiswaan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Triyono, Bambang. "Komunikasi Organisasi dalam Kepemimpinan Gerakan Mahasiswa Islam." *Studi Islam dan Pergerakan Mahasiswa* 5, no. 2 (2021): 40–55.
- Utami, S. G. A., dan F. Najicha U. "Kontribusi mahasiswa sebagai agent of change dalam penerapan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan bermasyarakat." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (2022): 96–101.
- Wulandari, Rani, dan Dimas Arif. "Transformasi Peran Organisasi Mahasiswa Islam dalam Mrespons Perubahan Sosial di Era Disrupsi." *Komunikasi Sosial dan Politik* 8, no. 1 (2022): 15–28.
- Zuhri, dan Saifuddin. *Berangkat dari Pesantren*. Jakarta: Gunung Agung, 1985.
- Kegiatan-kegiatan PMII Mapaba, PKD, dan seminar publik, Observasi PMII di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bungo*, n.d.
- Pedoman Kaderisasi PMII, PB PMII*. Revisi., 2022.
- pedoman KOPRI Nasional, PB PMII*, 2020.
- Pedoman pengkaderan nasional PMII, PB PMII*, 2019.